

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Putri Pandan Wangi

NPP. 30.0711

*Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Keuangan Publik*

Email: wpandan20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Asep Hendra, SE, MM

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The author focuses on problems in the form of the lack of readiness of human resources as SIPD managers, administrative processes that have not run optimally and the availability of software that is not perfect in improving the quality of local government financial statements through the Regional Government Information System (SIPD).*

**Purpose:** *The purpose of this study is to identify the extent of the effectiveness of the Local Government Information System (SIPD) in improving the quality of local government financial statements in Semarang District, Central Java Province.*

**Method:** *This study uses qualitative descriptive methods on the effectiveness of computer-based information systems according to Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon Theory. Data collection techniques were conducted by interviews (8 informants), observation and documentation.*

**Result:** *The findings obtained by the author in this study are that the Regional Government Information System (SIPD) used has not been effective so that in reporting it must use a support system or double system, namely by using the Regional Financial Management Information System (SIPD) to back up the data.*

**Conclusion:** *The effectiveness of the Regional Government Information System in improving the quality of local government financial statements (LKPD) in Semarang Regency, Central Java Province, has not been effective because several obstacles are still found, especially in indicators of human resources, processes, networks and telecommunications as well as the availability of software which is not adequate.*

*The efforts to improve system-based financial management through the Regional Government Information System (SIPD) are carrying out technical guidance with the Ministry of Home Affairs and other local governments, using a companion system to produce financial statements and increasing network capacity around the Regional Finance Agency (BKUD) of Semarang Regency.*

**Keywords:** *Effectiveness, LKPD, SIPD.*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan berupa minimnya kesiapan sumber daya manusia sebagai pengelola SIPD, proses penatausahaan yang belum berjalan maksimal serta ketersediaan perangkat lunak (*software*) yang belum sempurna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer menurut Teori Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (8 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan belum efektif sehingga dalam pelaporannya harus menggunakan sistem pendukung atau double system yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) untuk *memback up* datanya. **Kesimpulan:** Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah belum efektif karena masih ditemukan beberapa kendala terutama pada indikator sumber daya manusia, proses, jaringan dan telekomunikasi serta ketersediaan perangkat lunak (*software*) yang belum memadai. Adapun upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berbasis sistem melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini yaitu melaksanakan bimbingan teknis dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah lainnya, menggunakan sistem pendamping untuk melahirkan laporan keuangan dan menambah kapasitas jaringan di sekitar lingkungan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang.

**Kata kunci:** Efektivitas, LKPD, SIPD.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa otonomi daerah di Indonesia menerapkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Guna mendukung terselenggaranya perihal otonomi daerah tersebut pemerintah daerah selaku pengelola anggaran harus menyediakan informasi keuangan dengan memperhatikan prinsip seperti *accurate*, *relevance*, *timeliness* dan *trusted* di dalamnya. Untuk menindaklanjuti perihal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan daripada adanya pengelolaan keuangan daerah yakni peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Pada regulasi tersebut telah dijelaskan bahwa laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di serahkan kepada kepala daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan.

Hal tersebut juga termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Perubahan yang terdapat pada regulasi tersebut apabila diamati serta dibandingkan dengan regulasi yang sebelumnya mengenai nomenklatur belanja, pendapatan dan pembiayaan. Perubahan tersebut terjadi pada bagian penatausahaan ini yang mengharuskan pemerintah daerah untuk segera tanggap dalam melakukan perubahan, inovasi serta penyesuaian kembali dengan regulasi terbaru.

Pengembangan inovasi yang dimaksud dalam regulasi tersebut guna menyikapi perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 214 bahwasanya setiap pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing. Untuk memudahkan dalam mempublikasikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah maupun informasi tentang pemerintahan daerah lainnya kepada publik, maka Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sebuah sistem yang saling terhubung dan terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Kuangan Daerah, dan saat ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari sekian Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dimana pada 2019 mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dimana sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam membantu proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah digunakan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik dari eksternal maupun internal. Dalam proses penerapannya masih sering menemui kendala antara lain kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai, proses penatausahaan yang belum berjalan secara maksimal, jaringan internet yang sering mengalami gangguan dan juga ketersediaan perangkat lunak (*software*) yang belum sempurna. Sehingga harus menggunakan sistem pendamping atau double system dalam *memback up* data di dalamnya.

Hal-hal tersebut menjadi sangat *urgent* karena hal ini berkaitan dengan kualitas daripada laporan keuangan yang dihasilkan nantinya sebagai bukti pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah digunakan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian oleh Ni Ketut Sudianing dan Ketut Agus Saputra berjudul Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah menemukan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi bagian *e-government* memiliki fungsi kritis dalam suatu perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang begitu responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah dan juga dapat mendorong transparansi serta keterbukaan publik di daerah.

Penelitian Atik Andhayani berjudul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: *e-budgeting* untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah menemukan bahwa sebelum dilaksanakan *e-budgeting* banyak terjadi kesalahan *entry* manual anggaran dan setelah dilaksanakan *e-budgeting* membuktikan bahwa pelaksanaan *e-budgeting* telah mengalami beberapa perubahan dan juga mengalami kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak (Andhayani, 2020).

Penelitian Santi Silfiani berjudul Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Pada Pemerintah Kabupaten Magelang menemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) pada Pemerintah Kabupaten Magelang telah sesuai dengan prosedur yang ada. Kendala dalam pengimplementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan pada Pemerintah) Kabupaten Magelang diantaranya kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan sistem, masalah jaringan atau koneksi, masalah pada *hardware* atau perangkat keras maupun masalah pada *software* atau perangkat lunak. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan daripada sebelum implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Akibatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan

lebih berkualitas daripada sebelum implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) (Silfiani, 2021).

Penelitian Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya di Medan belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, disamping kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan teknis menyebabkan banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum terbiasa menggunakan sistem tersebut (Nasution & Nurwani, 2021).

Penelitian Nanda Dias Ekaputra berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Di Kabupaten Nganjuk menemukan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih dinilai kurang efektif ditahun pertama penerapannya. Adapun yang masih menjadi hambatan dalam efektivitas penggunaan sistem diantaranya seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi yang digunakan dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang dirasa membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan cara sosialisasi penggunaan sistem informasi dan juga perubahan nomenklatur terbaru, serta adanya pendampingan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Nganjuk (Ekaputra, 2021) .

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih spesifik kepada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori sistem informasi berbasis komputer dari Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2017) dimana suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa indikator yang terdapat dalam tiga dimensi yakni dimensi organisasi, dimensi manajemen dan dimensi teknologi.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk dapat menggambarkan serta menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga untuk mengetahui kendala serta upaya di dalamnya. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan dengan menggabungkan fakta dan data kemudian disusun serta dianalisis.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 8 informan yang terdiri dari kepala badan keuangan daerah, sekretaris badan keuangan daerah, kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi, kepala subbidang perencanaan anggaran, kepala subbidang pelaporan dan operator atau staff lainnya (2 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Efektivitas Sistem Informasi

Berbasis Komputer dari Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2017) yang berpendapat bahwa sistem informasi berbasis komputer dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa indikator dalam dimensi organisasi, dimensi manajemen dan dimensi teknologi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan teori dari Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2017) yang menyatakan bahwa suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa indikator dalam dimensi organisasi, dimensi manajemen dan dimensi teknologi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Dimensi Organisasi**

Organisasi merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang saling bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam penelitian ini, dimensi organisasi memiliki beberapa indikator antara lain sumber daya manusia, struktur organisasi, proses, aspek politik dan budaya organisasi.

##### **3.1.1 Sumber Daya Manusia**

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tentu menjadi salah satu penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Hal ini berkaitan dengan keterampilan serta pemahaman terkait sistem komputerisasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga ketika pengoperasian sistem informasi tersebut dapat menginput setiap komponen dengan benar. Adapun kendala yang ditemui ketika penelitian yakni terkait dengan ketidaksiapan pegawai Badan Keuangan daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikarenakan masih ditemui kendala dalam sistem itu sendiri.

##### **3.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yakni susunan atau hubungan antarbagian unit yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menggambarkan komponen-komponen yang menyusun organisasi, dimana setiap personal atau sumber daya manusia yang ada pada lingkup organisasi tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam implementasinya Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta telah dilakukan koordinasi terkait dengan pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik di internal maupun eksternal organisasi.

##### **3.1.3 Proses**

Proses merupakan semua kegiatan utama yang dilaksanakan dalam suatu organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses organisasi dimaksudkan yakni proses pengelolaan keuangan daerah terutama di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kabupaten Semarang. indikator proses mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik dibidang

penganggaran meskipun dibagian penatausahaan belum dapat dikatakan maksimal karena terkendala dalam sistem itu sendiri sehingga tidak dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### **3.1.4 Politik**

Politik organisasi berkaitan dengan proses saling mempengaruhi antara individu satu dengan individu lainnya yang ada didalamnya serta bagaimana cara pandang setiap individu dalam organisasi hal ini berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjadi satu-satunya sistem yang digunakan di Badan Keuangan daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini pihak Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang akan berkomitmen untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh namun dengan catatan tetap akan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk *memback up* datanya.

### **3.1.5 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi yang sudah diterapkan tiga tahun terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang, tepat pada tahun 2019 sebelum diimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan daerah (BKUD) Kabupaten Semarang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dimana sistem tersebut tentunya belum terintegrasi secara nasional. Budaya kerja atau budaya organisasi yang diterapkan oleh seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sebagaimana budaya kerja nasional yang telah ditetapkan. Di sisi lain, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang sudah dapat dinilai cukup baik hanya saja SIPD ini pada dasarnya seharusnya membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien palah sebaliknya dimana kami harus menggunakan *double system* sebagai *back up* data sehingga harus bekerja dua kali *input* ke SIPD dan juga ke dalam SIPKD sehingga menjadi kurang efektif.

### **3.2. Dimensi Manajemen**

Organisasi dalam mencapai tujuan di dalamnya memerlukan adanya suatu manajemen organisasi ketika akan menerapkan suatu sistem dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Manajemen merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk membantu mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya sesuai dengan target dan juga visi misi daerah. Dimensi manajemen memiliki indikator yakni ketersediaan informasi oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Semarang. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kabupaten Semarang. Ketersediaan data yang akan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini berasal dari usulan-usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke bagian aset secara manual sesuai dengan format yang di dalamnya terdapat kode barang, nama barang, spesifikasi barang, satuan harga, rekening belanja dan kelompok barang. Seperti permintaan barang cepat apabila sudah diverifikasi yang kemungkinan memakan waktu empat hari dan usulan tersebut dapat langsung diverifikasi.

### 3.3. Dimensi Teknologi

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks tersedianya teknologi menjadi alat bantu dalam pemenuhan pelbagai hal, terutama dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan teknologi saat ini telah dimanfaatkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna membantu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Semarang. Salah satu inovasi dalam bidang teknologi yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Dimensi teknologi ini sendiri terdiri dari indikator teknologi manajemen data, telekomunikasi dan jaringan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), fasilitas perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*), serta infrastruktur teknologi informasi sebagai berikut:

#### 3.3.1 Teknologi Manajemen

Manajemen data merupakan serangkaian proses yang mengatur data supaya dapat diakses dengan aman dan teratur. Dengan adanya suatu manajemen data menggunakan teknologi berbasis sistem informasi dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan disajikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen data ini berkaitan dengan keamanan sistem (*system security*) dari data yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri serta tidak terlepas dari berbagai aktor maupun pihak yang tidak sembarangan dapat mengakses sistem tersebut. Dalam hal ini bahwasanya pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini pihak-pihak yang tidak berkewenangan terhadap data tidak dapat mengakses sistem secara mudah, dikarenakan untuk pengoperasian sistem hanya pimpinan dan operator saja yang dapat mengakses sistem ini yang dipastikan sudah memiliki akun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### 3.3.2 Telekomunikasi dan Jaringan SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem yang terintegrasi ini sangat bergantung dengan adanya ketersediaan jaringan dan telekomunikasi yang memadai karena sistem informasi yang digunakan yakni sistem berbasis website. Sehingga untuk dapat mengoperasikannya harus tersambung dengan koneksi internet yang memadai. Pada dasarnya server Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini berada di pusat dan tidak dapat *maintenance* atau *custom* sendiri sehingga seperti dalam hal pencairan dana mengalami keterlambatan akibat *trouble* dari jaringan ini sendiri.

#### 3.3.3 Fasilitas Perangkat Keras (*Hardware*) dan Lunak (*Software*)

Ketersediaan perangkat keras (*hardware*) serta perangkat lunak (*software*) tentunya akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam menunjang proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan tahun 2019 oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Ketersediaan perangkat keras (*hardware*) seperti komputer, laptop, mesin cetak dan scan sudah tersedia dalam membantu untuk mencetak dokumen dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sedangkan dilihat dari ketersediaan perangkat lunak (*software*) ini sendiri memiliki kekurangan seperti tidak tersedianya menu untuk upload lampiran perda ke dalam sistem tersebut sehingga harus dilakukan secara manual dan tidak dapat mencetak DPA SKPD di tahun 2023 serta belum dapat melahirkan laporan keuangan yang diharapkan.

### **3.3.4 Infrastruktur Teknologi Informasi**

Infrastruktur teknologi informasi berkaitan dengan piranti-piranti yang digunakan. Dalam hal ini berkaitan dengan kecanggihan atau kehandalan daripada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang membantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Keuangan daerah (BKUD) Kabupaten Semarang sebelum mulai menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD). Namun, SIPKD ini sendiri belum terintegrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan sedangkan SIPD dirancang terintegrasi dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Kalau dibandingkan antara SIPD dengan SIPKD tentu saja saat ini lebih canggih SIPD dan juga lebih menguntungkan daripada SIPKD. Disisi lain, SIPD juga dapat meminimalisir adanya kesalahan dan juga untuk kebutuhan datanya sendiri dapat mudah terpenuhi karena semuanya sudah diinput kedalam SIPD.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yakni adanya peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan. Penulis menemukan temuan yang penting yakni efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum dapat dikatakan efektif karena terdapat beberapa indikator yang tidak terpenuhi salah satunya yakni ketidaksiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut, sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Andhayani, 2020). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini juga masih menemui kendala terkait dengan jaringan yang menghambat ketika akan proses upload data, sama halnya penelitian oleh Santi Silfiani bahwasanya penerapan SIMDA Keuangan masih terkendala dalam hal jaringan (Silfiani, 2021). Hal tersebut juga didukung dengan penelitian Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani bahwasanya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum berjalan dengan baik karena kualitas sistem yang belum sempurna serta kurangnya bimbingan teknis pengelola sistem (Nasution & Nurwani, 2021). Penulis dalam hal ini lebih menitikberatkan pada efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan penelitian oleh Nanda Dias Ekaputra yang lebih condong terhadap penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (Ekaputra, 2021).

### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat terkait efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Semarang tetap harus menggunakan sistem pendukung atau double systems untuk memback up data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dinilai sudah cukup *settle* untuk digunakan dan dapat melahirkan laporan keuangan daerah yang dibutuhkan.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah belum dapat dikatakan efektif karena masih ditemukan beberapa kendala di dalamnya. Guna meningkatkan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, disarankan agar Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga perangkat daerah lainnya secara bertahap dan juga menggunakan sistem pendamping (double system) untuk melahirkan laporan keuangan pemerintah daerah serta menambah kapasitas jaringan di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andhayani, Atik. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah E-Budgeting Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4 (2) 183-193.
- Ekaputra, Dias Nanda. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Otonomi* Vol. 21 (1).
- Laudon KC & JP Laudon. 2017. *Management Information Systems*. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.  
<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Purnomowati, Hasanah & Silfiani, Santi. (2021). Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA 11 Keuangan) Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21 (2).
- Saputra, Ketut Agus & Sudianing, N. K. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11 (2).